

**PENERAPAN TEORI KEAGENAN DALAM ANALISIS
KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK**

Dwi Urip Wardoyo, Athirah Nursadrina, Christina Pungky Susanta, Rima Puspita
Prodi Akuntansi, Universitas Telkom-Bandung

Email: dwiurip@telkomuniversity.ac.id, athirahsadrina@gmail.com,
christinapsusanta@gmail.com, rimapuspita79@gmail.com

Abstract

This study aims to measure financial performance based on the analysis ratio of finance to capital expenditure in the West Java region in 2021. The test was conducted in 27 counties/cities of West Java using quantitative analysis with simple regression. Financial performance analysis using the independence ratio calculation, effectiveness, and efficiency. Capital expenditures for public services are Measured utilizing the amount of capital expenditure for public services in the budget. The results showed that the independence and effectiveness ratios significantly positively affect capital spending for public services in counties/cities of West Java. Therefore, local governments are expected to prioritize local government financial performance to increase local capital expenditures.

Keywords: *Financial performance, regional budget, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and capital expenditures*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan daerah berdasarkan analisis rasio keuangan terhadap belanja modal di wilayah Jawa Barat pada tahun 2021. Pengujian dilakukan di 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat melalui analisis kuantitatif dengan regresi sederhana. Analisis kinerja keuangan menggunakan perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Belanja modal untuk pelayanan publik diukur menggunakan besaran belanja modal untuk pelayanan publik dalam anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, APBD, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah adalah upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam bentuk desentralisasi. Adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan setiap daerah kepada pemerintah pusat karena dapat meningkatkan kreativitas, inovasi dan kemandirian (Christia & Ispriyarso, 2019).

Kebijakan tersebut tentunya saling berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut yang akhirnya membuat prinsip Money Follow Function diterapkan dengan harapan dapat membangun konsep penganggaran yang efektif, efisien, dan menjaga kesinambungan keuangan melalui upaya peningkatan kualitas belanja (*quality spending*). Prinsip ini juga menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah.

Dalam hal ini tentu kinerja keuangan dari pemerintah daerah menjadi salah satu tolak ukur baik atau tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Baik atau tidaknya kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kemandirian, efektivitas pemungutan PAD, serta efisiensi belanja daerah (Halim, Perova, & Reynolds, 2023). Kinerja keuangan daerah juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Sebab kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila pemerintah daerah menggunakan sumber pendapatan daerah lebih banyak untuk pelayanan publik (Zukhri & Valeriani, 2019). Hal ini dikarenakan penggunaan sarana pelayanan publik akan langsung bersentuhan dengan masyarakat daerah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di wilayah Jawa Barat terhadap pelayanan publik yang bersentuhan langsung pada masyarakat. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Data yang akan digunakan merupakan data keuangan tahun 2021 daerah Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Pemerintah Kabupaten /Kota se-Jawa Barat dengan jumlah 27 Pemerintah Kabupaten /Kota. Data yang digunakan merupakan data selama 1 tahun yaitu tahun 2021 meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel adalah dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019), teknik *purposive sampling* menggunakan pertimbangan tertentu untuk menentukan sampel. Adapun pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kabupaten /Kota di wilayah Jawa Barat yang telah menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahun 2021 dan telah diaudit oleh BPK-RI.
- 2) Laporan Realisasi APBD yang dipublikasikan bisa diakses dan memiliki informasi yang lengkap untuk diolah.

Penelitian ini akan membahas pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik se-Jawa Barat dengan menggunakan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2021 yang diperoleh dari data sekunder, yakni

data yang bersumber dari www.djpk.depkeu.go.id. Terdapat 2 (dua) jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen (variabel bebas) dan belanja modal untuk pelayanan publik sebagai variabel dependen (variabel terikat). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model regresi linier sederhana yang disajikan pada persamaan sebagai berikut :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta X + et$$

dimana: \hat{Y} adalah belanja modal untuk pelayanan publik; X adalah kinerja keuangan pemerintah daerah; α adalah konstanta; $\beta_1\beta_2\beta_3$ adalah parameter penduga; et adalah variabel pengganggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi pada data Laporan Realisasi APBD tahun 2021 untuk menentukan adanya sebab-akibat antara variabel satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil regresi di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Regresi

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,58603924
R Square	0,343441991
Adjusted R Square	0,25780399
Standard Error	301,1348734
Observations	27

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	3	1091013,769	363671,2564	4,01039243	0,019646451
Residual	23	2085690,875	90682,21197		
Total	26	3176704,645			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	-286,3855585	1299,758629	-0,220337494	0,827552395
Rasio Kemandirian	767,8145318	326,3563911	2,352687285	0,027564901
Rasio Efektivitas	679,9612849	318,6153862	2,134113148	0,043717931
Rasio Efisiensi	-109,4003283	1142,302877	-0,095771735	0,924531441

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi dengan tujuan untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat dari belanja modal dan kinerja keuangan daerah pada tahun 2021 di wilayah Kabupaten /Kota se-Jawa Barat yang diukur berdasarkan rasio-rasio kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan hasil Adjusted R Square, dapat dilihat bahwa ketiga rasio yang kami gunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan wilayah Kabupaten /Kota se-Jawa Barat yaitu dengan indikator rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan juga rasio efisiensi berpengaruh sebesar 25,780399% atau sekitar 26% terhadap belanja modal. Hal ini juga didukung oleh hasil uji F dimana menunjukkan hasil $<0,05$ yaitu sebesar 0,019646451 yang berarti bahwa rasio-rasio tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Sedangkan untuk 74% lainnya merupakan indikator lain yang mempengaruhi belanja modal untuk pelayanan publik.

Hasil uji T menunjukkan bahwa rasio-rasio tersebut akan berpengaruh secara signifikan apabila hasil yang diperoleh kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil dari perhitungan P-Value (tabel 2) dapat dilihat bahwa rasio kemandirian berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik yaitu sebesar 0,028. Dan dalam rasio efektivitas berpengaruh signifikan positif pula terhadap belanja modal untuk pelayanan publik yaitu sebesar 0,044. Berbeda dengan kedua rasio sebelumnya, rasio efisiensi berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik.

Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten /Kota se-Jawa Barat dapat dibuktikan dengan hasil pengolahan data (tabel 2) yang memperoleh persamaan regresi untuk pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten /Kota se-Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

$$\hat{Y} = -286,386 + 1.338,376X$$

Hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi (β) untuk kinerja keuangan yaitu sebesar 1.338,376 yang artinya setiap kenaikan 1% pada kinerja keuangan Kabupaten /Kota se-Jawa Barat, maka belanja modal untuk publik akan meningkat yaitu sebesar Rp 1,33 miliar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode regresi dengan tujuan untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat dari belanja modal dan kinerja keuangan daerah pada tahun 2021 di wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dapat diukur berdasarkan rasio-rasio kinerja keuangan daerah yang kemudian dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini memiliki arti bahwa apabila rasio kemandirian serta efektivitas keuangan daerah meningkat, akan berpengaruh terhadap jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Sedangkan untuk rasio efisiensi berpengaruh positif namun tidak signifikan yang berarti bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hasil persamaan regresi linear sederhana pun menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik, yakni setiap kenaikan 1% pada kinerja keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, maka belanja modal untuk publik akan meningkat yaitu sebesar Rp 1,33 miliar.

BIBLIOGRAFI

- Ardhini. dan Sri Handayani. 2012. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Jawa Tengah). *Jurnal*
- Delima, N.A., Marwa, T. and Yulianita, A. (2016) 'Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik di Sumatera Bagian Selatan', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), pp. 69–78. Available at: <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/indexDOI:https://doi.org/10.29259/jep.v14i2.8819>.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Hermi Oppier. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Benchmark Volume 2 November 2013*.
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, ANDI
- Christia, Adissya Mega, & Ispriyarso, Budi. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Halim, Daniel, Perova, Elizaveta, & Reynolds, Sarah. (2023). Childcare and mothers' labor market outcomes in lower-and middle-income countries. *The World Bank Research Observer*, 38(1), 73–114.
- Zukhri, Nizwan, & Valeriani, Devi. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(1), 12–21.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Christia, Adissya Mega, & Ispriyarso, Budi. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Halim, Daniel, Perova, Elizaveta, & Reynolds, Sarah. (2023). Childcare and mothers' labor market outcomes in lower-and middle-income countries. *The World Bank Research Observer*, 38(1), 73–114.
- Zukhri, Nizwan, & Valeriani, Devi. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(1), 12–21.

Copyright holders:
Nama Penulis (Tahun Terbit)

First publication right:
Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

